

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E- Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barder Johan, 2004, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Semarang.
- Budi Sutedjo Dharma Ocsomo, dkk. 2007, *Pengantar Teknologi Informasi Internet Konsep dan Aplikasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Dessy Anwar, 2003, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Galang Taufani Suteki, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta
- Johnny Ibrahim, 2019, *Teori & Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Lorens bagus, 2005, *Kamus Filsafat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- M Suryodiningrat, 1996, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*, Tarsito, Bandung.
- Misnar Syam, 2022, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen*, Rajawali Pers, Depok.
- Ninick Suparni, 2009, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Peter Mahmud Marzuk, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Pipin, Syarifin dan Dedah Jubaedah, 2012, *Hukum Dagang di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung.

- Prayudi, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saiful Anwar, 2004, *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Glora Madani Press.
- Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shinta Dewi, 2009, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam Ecommerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Paljajanan, Bandung.
- Siagian, Sondang. P, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sujamto, 1990, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Victor M, Situmorang dan Yusuf Juhir, 1993, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Wirjono Projudikoso, 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuann-Persetujuan Tertentu*, Sumir, Bandung.
- Zaenal Abidin, 2007, *Analisis Eksistensial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Jurnal**

- Adhi Anugroho, Ratih Lestarini, dan Tri Hayat , 2017, *Analisis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Uud 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 2. 2017.
- Budi Bahreysi, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Jual Beli secara Online*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 Nomor 2.
- Izzatul Islami Harli, dkk., 2021, *pengaruh online consumer review dan rating terhadap Minat beli produk kesehatan pada e-marketplace shopee Selama masa pandemi covid-19*, Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia Volume 04, Nomor 04, 2021.

Putu Erick Sanjaya Putra,dkk., 2019, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Jual Beli Barang Melalui e-commerce*, Jurnal Analogi Hukum Vol. 1 No. 2.

Herma Yanti, 2010, *Mekanisme Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah Menurut Unang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Lex Specialist, no. 11, Jun. 2010.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata ( KUH Perdata)

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan.

### D. Website

Ananda, Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Teori%20kepastian%20hukum%20yang%20dikemukakan,serta%20memahami%20sistem%20hukum%20negara.>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Kementerian Perdagangan, Tugas dan Fungsi, <https://ditjenpktn.kemendag.go.id/tugas-fungsi,>